Perubahan Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India Tahun 2001 dan 2005

Irmawati Khoirunnisa

071411231046

S1 Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Dinamika perkembangan politik keamanan internasional pada abad ke-21 dipenuhi dengan pengembangan nuklir atas alasan pertahanan keamanan internasional. India merupakan salah satu negara yang aktif dalam mengembangkan nuklir sejak tahun 1944. Pada tahun 1998, India melakukan uji coba nuklir skala besar dan menuai berbagai respon dari dunia internasional. Kala itu, Amerika Serikat merespon uji coba nuklir India tahun 1998 dengan memberikan sanksi ekonomi dan juga militer. Namun pada tahun 2001, Presiden W. Bush resmi mengangkat seluruh sanksi yang pernah dijatuhkan Amerika Serikat kepada India akibat uji coba nuklirnya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga meningkatkan hubungan bilateral dan menjalin hubungan kerjasama dengan India di bidang nuklir. Pada tahun 2005, Amerika Serikat menunjukkan dukungannya kepada India untuk menjadi anggota Nuclear Suppliers Group (NSG).

Kata-Kata Kunci: Amerika Serikat, Nuklir India, Sistem Internasional, Tiongkok.

India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang aktif dalam mengembangkan nuklir sejak tahun 1944. Keinginan India dalam mengembangkan nuklir perama kali dikatakan oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dalam pidatonya yang berbunyi "We must develop this atomic energy quite apart from war-indeed I think we must develop it for the purpose of using it for peaceful purposes. Of course, if we are compelled as a nation to use it for other purposes, possibly no pious sentiments of any of us will stop the nation from using it that way." (Nuclearweaponsarchive.org, 2001). Tidak hanya itu, Jawaharlal Nehru juga mengatakan bahwa India memiliki kapabilitas untuk mengembangkan nuklir yang dapat digunakan sebagai proteksi negaranya. Untuk itu, pada tahun 1945, India membentuk Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) yang merupakan institut penelitian nuklir yang menyediakan ilmu dan teknologi mutakir yang dapat digunakan untuk membantu usaha pengembangan nuklir kala itu (Nuclearweaponsarchive.org, 2001).

Di bawah kendali Sir Dorab Tata, TIFR kemudian berkembang semakin pesat dan menghasilkan banyak program-program pengembangan nuklir. Pada tahun 1974,

India berhasil melakukan uji coba nuklir pertama kali dengan jangkauan ledakan sejauh 40 meter dan menghasilkan kawah sedalam 10 meter. Uji coba nuklir ini kemudian disebut dengan The Smiling Buddha (Nuclearweaponsarchive.org, 2001). Keberhasilan India dalam uji coba nuklir pertamanya kemudian semakin mendorong negara tersebut untuk terus mengembangkan senjata nuklirnya. Hingga pada tahun 1998, India melakukan uji coba nuklir kedua dengan meluncurkan lima misil balistik sekaligus yang disebut Agni I-V dengan total jangkauan ledakan sejauh 5.500km. Uji coba tersebut kemudian menjadi uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan India dan mendapatkan berbagai respon negatif dari banyak negara. Pakistan, sebagai negara tetangga India yang paling dekat, beranggapan bahwa ambisi India untuk mengembangkan nuklir dapat mendorong negara-negara muslim yang ada di Asia Tengah untuk juga mengembangkan nuklirnya. Disisi lain, Tiongkok merespon uji coba nuklir India tahun 1998 dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhu Bangzao, yang mengatakan bahwa uji coba nuklir India akan membahayakan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Selatan (Thehindu.com, 2016).

Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Nuklir Tahun 1998

Respon Amerika Serikat terhadap uji coba nuklir India tahun 1998 pun juga tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan kekecewaan Presiden Bill Clinton atas tindakan India yang memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir ketika tidak ada ancaman apapun. Kekecewaan ini digambarkan dari pernyataan Clinton yang berbunyi "I believe they (the nuclear tests) were unjustified. They clearly create a dangerous new instability in their region and, as a result, in accordance with U.S. law, I have decided to impose economic sanctions against India" (CNN.com, 1998). Sesaat setelah Amerika Serikat memberikan pernyataan tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan beberapa sanksi ekonomi dan militer terhadap India melalui sec.102 the Arms Export Control Act (AECA) yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1998 (Medalia dan Rennack, 1998). Sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat meliputi penghentian bantuan kemanusiaan yang selama ini diberikan Amerika Serikat kepada India tiap tahun, menghalangi aktifitas impor material yang dilakukan oleh India, menghentikan kredit dan jaminan kredit Amerika Serikat terhadap India, dan menentang pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan internasional terhadap India. Sedangkan untuk sanksi militer, Amerika Serikat menjatuhkan tiga sanksi kepada India, yaitu (1) menghentikan penjualan perlengkapan militer asing di bawah the Arms Export Control dan menarik kembali izin untuk melakukan penjualan komersial amunisi apapun yang berasal dari Amerika Serikat, (2) menolak melakukan ekspor *dual-use item controlled* dan segala bentuk ekspor barang-barang yang berhubungan dengan program pengembangan misil dan senjata nuklir, dan (3) menghentikan segala bentuk *military assistance* yang selama ini diberikan oleh Amerika Serikat (Morrow, dan Carriere, 1999).

Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India Tahun 2001 dan 2005

Pemberian sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada India akibat uji coba nuklirnya tahun 1998 menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberikan respon yang negatif. Namun pada tahun 2001, respon Amerika Serikat mulai menunjukkan perubahan. Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan seluruh sanksi yang pernah diberikan Amerika Serikat sebelumnya, dan peningkatan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan India. Pada 22 September 2001, Presiden George W. Bush resmi mengangkat seluruh sanksi yang sebelumnya menjerat India akibat uji coba nuklirnya tahun 1998. Dalam kaitan ini, Presiden Bush berkata "The Indian sanctions were not in the national security of the United State" (BBC, 2001). Tidak hanya itu, Amerika Serikat dan India juga sepakat untuk membuat sebuah Joint Statement pada November 2001 yang berisi tentang enam hal utama. Pertama, menegaskan kembali hubungan baik antara kedua negara dan pentingnya transformasi untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Kedua, paham bahwa kedua negara merupakan target dari aksi terorisme sebagaimana yang terlihat dalam serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 di Gedung WTC, Amerika Serikat dan serangan 1 Oktober yang terjadi di Gedung Dewan Legislatif Jammu dan Khasmir di Srinagar, India yang diduga perbuatan teroris yang bermarkas di Pakistan. Ketiga, merasa puas dengan kemajuan kerjasama yang dibuat Amerika Serikat-India dalam mencegah aksi terorisme. Poin keempat adalah mengumumkan pembentukan inisiatif Joint Cyber-Terrorism. Kelima adalah setuju untuk memulai sebuah dialog antara dua negara dengan maksud untuk mengevaluasi proses transfer dual-use dan item militer secara transparan dan efisien. Sedangkan yang terakhir adalah setuju untuk menginisiasi diskusi untuk membahas tentang kerjasama civil space (Tomar, 2002).

Hubungan baik antara Amerika Serikat dan India kemudian semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, kedua negara sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang militer. Kerjasama tersebut kemudian berkembang dan meluas ke bidang-bidang lain, seperti ekonomi, perdagangan dan investasi, keamanan dan pertahanan militer, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan cyber, energi bersih, lingkungan, agrikultur, kesehatan dan counter-terrorism, hingga kerjasama yang terjalin diantara kedua negara berkembang menjadi kerjasama multisektoral (Mea.gov.in, 2013). Tidak hanya itu, pada tahun 2005, pemerintah Amerika Serikat mulai menunjukkan dukungannya kepada India untuk bergabung ke dalam Nuclear Suppliers Group (NSG). Dukungan ini diberikan Amerika Serikat melalui pernyataan White House Press Secretary, Josh Earnest, yang berbunyi "We believe, and this has been U.S. policy for some time, that India is ready for membership and the United States calls on participating governments to support India's application at the plenary session of Nuclear Suppliers Group (NSG)." (Thehindu.com, 2016). Pernyataan ini diberikan Earnest pada hari kelima *annual plenary session of the 48-member club* di Korea Selatan.

Melalui pernyataan tersebut, Amerika Serikat menunjukkan sikap positifnya terhadap bergabungnya India dalam NSG. Di samping itu, Amerika Serikat juga melakukan persuasi kepada negara lain untuk turut mendukung India agar dapat

bergabung ke dalam NSG bahkan sebelum India menandatangani perjanjian Non-Proliferasi Treaty (NPT). Namun, usaha Amerika Serikat dalam menjadikan India anggota NSG ditentang oleh Tiongkok. Hal ini dikarenakan menurut Tiongkok, India paling tidak harus terlebih dulu menandatangani NPT sebelum menjadi anggota NSG. Karena hal tersebut dapat mencegah India dalam menggunakan senjata nuklir untuk tujuan militer. Karena apabila India bergabung dengan NSG, India akan secara mudah mengakses bahan dasar dan teknologi untuk mengembangkan senjata nuklir (Gahlot, 2016).

Dibalik Perubahan Respon Amerika Serikat

Jika melihat perubahan respon Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India pada tahun 2001 dan 2005, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan respon tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Amerika Serikat memberikan respon negatif terhadap pengembangan nuklir India dibuktikan dengan pemberian sanksi ekonomi dan militer oleh Amerika Serikat kepada India ketika India melakukan uji coba nuklir tahun 1998. Namun pada tahun 2001, Amerika Serikat mengangkat seluruh sanksi yang pernah diberikannya kepada India, dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Sedangkan pada tahun 2005, Amerika Serikat secara tegas memberikan dukungannya kepada India untuk turut bergabung dengan NSG walaupun India belum menandatangi perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Sehingga dapat dilihat bahwasannya terdapat perubahan yang mencolok atas respon yang diberikan Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India, yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor berikut.

Sistem Internasional Multipolar

Tahun 2001 dan 2005 menjadi titik balik perubahan respon Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India yang sebelumnya negatif menjadi positif. Sejak saat itu, Amerika Serikat sendiri cenderung mendukung India untuk terus mengembangkan nuklirnya melalui dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada India untuk menjadi anggota NSG. Disisi lain, Tiongkok yang menjadi negara *rising power* saat itu juga sangat aktif dalam mengembangkan nuklirnya. Pada tahun 2002, Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pengembangan nuklir Tiongkok dalam policy paper yang berjudul "China's National Defense in 2002" (NTI.org, 2004). Dalam policy paper tersebut, Tiongkok menyebutkan bahwa negaranya akan secara intens dalam mengembangkan nuklir dengan tujuan damai. Paper tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana cara Tiongkok dalam mengakses teknologi nuklir untuk tujuan damai menurut tiga prinsip pemerintahan Tiongkok.

Ketiga prinsip tersebut adalah (1) menjamin bahwa teknologi apapun yang digunakan harus bertujuan damai, (2) menerima nilai-nilai dalam International Atomic Energy Agency, dan (3) setuju untuk tidak melakukan transfer teknologi nuklir kembali kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari pemerintahan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga mengeluarkan policy paper yang lain pada

Desember 2003 yang berjudul "China's Non-Proliferation Policy and Measures" (NTI.org, 2004). Dalam policy paper ini, Tiongkok mendeskripsikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang mewakili kepentingan dunia yang sedang berkembang. Sehingga, Tiongkok percaya bahwa menjamin kepentingan negara-negara berkembang dan semua negara yang ingin mengembangkan nuklir secara damai merupakan hal yang penting. Tidak hanya itu, Tiongkok juga terus meningkatkan pengembangan nuklirnya dibuktikan dengan bergabungnya Tiongkok ke dalam NSG pada tahun 2004 (NTI.org, 2004).

Disisi lain, pada tahun 2005 Departemen Pertahanan Tiongkok melaporkan bahwa terdapat peningkatan aktifitas dalam pengembangan misil balistik yang dilakukan oleh negaranya. Sementara itu pada tahun 2006, pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa negaranya memiliki 250-296 peluncur misil dengan tujuh tipe. Hal ini menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik misil balistik yang dimiliki Tiongkok hingga tahun 2006 (Kristensen, 2006).

Pentagon Overview of China's Missile Forces, 2006

China's Missile Inventory	Launcher	Missiles	Estimated Range
DF-5/CSS-4 ICBM	20	20	8,460+ km
DF-4/CSS-3 ICBM	10-14	20-24	5,470+ km
DF-3/CSS-2 IRBM	6-10	14-18	2,790+ km
DF-21/CSS-5 MRBM Mod ½	34-38	19-50	1,770+ km
JL-1 SLBM	10-14	10-14	1,770+ km
DF-15/CSS-6 SRBM	70-80	275-315	600 km
DF-11/CSS-7 SRBM	100-120	435-475	300 km
JL-2 SLBM	DEVELOPMENTAL		8,000+ km
DF-31 ICBM*	DEVELOPMENTAL		7,250+ km
DF-31A ICBM	DEVELOPMENTAL		11,270+ km
Total	**250-296**	**793-916**	

* China defines the DF-31 as a long-range ballistic missile, not an intercontinental ballistic missile.

DF stands for Dong Feng which means ⬩east wave.⬩ The U.S. designation CSS stands for Chinese Surface-to-Surface. Color codes: Red (nuclear), Blue (possibly nuclear), Black (not nuclear).

Source: U.S. Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, *Military Power of the People⬩s Republic of China, 2006*, May 23, 2006, p. 50. Colors and notes added. Table reproduced and further analyzed in Hans M. Kristensen, et al., *Chinese Nuclear Forces and U.S. Nuclear War Planning*, Federation of American Scientists and Natural Resources Defense Council, November 2006, p. 38.

Walaupun Tiongkok mengaku bahwa negaranya mengembangkan nuklir hanya untuk sistem pertahanan negaranya, perilaku Tiongkok dapat dipandang sebagai tindakan diplomatis. Berkaitan dengan hal ini, pemimpin Tiongkok mengatakan bahwa nuklir yang dikembangkan Tiongkok merupakan hasil kombinasi dari PLA's conventional forces yang dapat digunakan baik untuk serangan nuklir maupun konvensional. Namun, pemerintah Tiongkok telah berjanji untuk tidak

menggunakan senjata nuklirnya lebih dulu apabila tidak ada ancaman yang ditujukan untuk negaranya (Kristensen, 2006). Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Tiongkok dengan perjanjian non –proliferasi nuklir (NPT) sebagai Nuclear Weapons State (NWS) pada tahun 1992. Selain itu, Tiongkok juga menjadi satu-satunya negara NWS yang telah meratifikasi the International Atomic Energy Agency (IAEA) Additional Protocol (Nuclearfiles.org, 2017).

Namun disisi lain, Tiongkok bukan merupakan negara yang meratifikasi the Comprehensive Test Ban Treaty, sehingga tidak ada jaminan bahwa Tiongkok tidak akan mengembangkan senjata nuklirnya dan akan terus mematuhi nilai-nilai dalam perjanjian non-proliferasi nuklir (Nuclearfiles.org, 2017). Hal ini dibuktikan dengan tindakan Tiongkok yang tetap melanjutkan modernisasi terhadap senjata nuklirnya walaupun Tiongkok banyak mensponsori resolusi pelucutan senjata nuklir di PBB. Pemerintah Tiongkok sendiri mengklaim tindakan tersebut sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan sistem pertahanan nasional. Saat ini, Tiongkok sedang berusaha untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam *nuclear detterent* melalui SSBN Force. Menurut laporan tahunan Departemen Pertahanan kepada *China's Congress* mengenai perkembangan keamanan militer Tiongkok pada tahun 2013, negara tersebut akan berfokus pada pengembangan PLA Navy sebagai "*credible sea-based nuclear deterrent*" pertama yang pernah dimiliki oleh Tiongkok (Johnston, 1996).

Semakin meningkatnya kapabilitas Tiongkok dalam mengembangkan senjata nuklir membuktikan bahwa sistem internasional saat ini berkembang semakin dinamis. Disisi lain, dengan kapabilitasnya dalam energi nuklir, India juga mulai berkembang sebagai negara *rising power Asia* yang telah mengubah tatanan sistem internasional dari yang awalnya unipolar dengan Amerika Serikat sebagai negara hegemon, menjadi multipolar, dengan munculnya banyak kekuatan-kekuatan baru seperti India dan Tiongkok. Adanya perubahan dalam sistem internasional dapat mempengaruhi perilaku suatu negara agar dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Hal ini selaras dengan asumsi dasar neorealisme yang mengatakan bahwa negara akan bertindak secara rasional untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya (Waltz, 1979). Teori neorealisme sendiri merupakan hasil reformulasi dari teori realisme yang menjadi teori tradisional dalam studi hubungan internasional.

Dalam teori neorealisme, negara dan sistem internasional dipandang sebagai aktor rasional yang akan berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya. Namun, dalam memenuhi kepentingan nasional tersebut, neorealisme lebih menekankan adanya kerjasama yang terjalin antar negara. Hal inilah yang membedakan teori neorealisme dengan realisme, karena realisme menggambarkan sistem internasional yang anarki dengan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tanpa adanya *global governance* yang dapat menciptakan perdamaian dan keamanan internasional (Bieler, 2008). Secara lebih jauh, Andreas Bieler (2008) mengatakan bahwa terdapat tiga asumsi utama yang dikemukakan oleh para pengstudi neorealis. Pertama, neorealis melihat bahwa negara merupakan aktor utama yang beroperasi dalam

tindakan rasional dan *utility-maximising way,* namun disisi lain terdapat pula aktor-aktor lain seperti organisasi internasional ataupun perusahaan transnasional yang dapat mempengaruhi dinamika sistem internasional walaupun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Kedua, sistem internasional dikarakteri dengan anarki. Namun terdapat perbedaan antara pemahaman anarki bagi realisme dan neorealisme. Realisme memandang anarki sebagai kondisi umum dalam operasional negara, sehingga level analisis yang digunakan juga akan berkonsentrasi pada penjelasan mengenai interaksi *units of analysis*. Sementara itu, neorealis lebih menekankan pada struktur internasional dimana anarki dipandang sebagai *ordering principle* dan distribusi kapabilitas ekonomi dan militer, sehingga level analisis yang digunakan juga level sistem internasional yang berfokus pada politik internasional dan distribusi kapabilitas dalam sistem internasional (Bieler, 2008).

Apabila meninjau kembali dari teori neorealisme yang mengutamakan pada tatanan sistem internasional, kebangkitan Tiongkok dan India merupakan fenomena penting bagi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa Tiongkok merupakan kompetitor terbesar bagi Amerika Serikat. Hal ini dikatakan oeh Presiden W. Bush ketika menghadiri debat dalam GOP Debate on the Larry King Show yang ditayangkan pada 15 Februari 2000. Pada saat itu, Presiden W. Bush megatakan "I believe our relationship needs to be redefined as competitor. Competitors can find areas of agreement, but we must make it clear to the Chinese that we don't appreciate any attempt to spread weapons of mass destruction around the world, that we don't appreciate any threats to our friends and allies in the Far East" (Ontheissues.org, 2017). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya melihat Tiongkok sebagai kompetitor, tetapi Amerika Serikat juga menyayangkan dan merasa *insecure* terhadap pengembangan nuklir Tiongkok. Hal ini yang mendorong Amerika Serikat melakukan segala cara untuk dapat berkompetisi dengan Tiongkok. Karena dalam pandangan neorealisme sendiri, esensi dari sistem internasional adalah sebuah *self-help system* dimana negara akan mengandalkan dirinya sendiri untuk dapat *survive* dalam sistem internasional (Waltz, 1979).

Perimbangan Dominasi Kekuatan Tiongkok

Amerika Serikat yang melihat Tiongkok sebagai negara kompetitor kemudian melihat pengembangan nuklir Tiongkok sebagai suatu hal yang dapat mengancam keamanan nasional negaranya (Waltz, 1979). Hal ini dibuktikan dengan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Defense Department's Office of International Security Affairs yang mengatakan bahwa perkembangan kapabilitas nuklir Tiongkok semakin meningkat. Oleh sebabnya, penting bagi Amerika Serikat untuk memikirkan konsekuensi yang ditimbulkan dari hal tersebut, termasuk kemungkinan kematian 100 juta warga negaranya apabila Amerika Serikat terlibat dalam konflik serius dengan Tiongkok (Burr, 2014). Dalam merespon perkembangan nuklir Tiongkok sendiri, Amerika Serikat dapat dikatakan sangat agresif. Sejak Tiongkok pertama kali melakukan uji

coba nuklir pada 16 Oktober 1964, badan intelijen Amerika Serikat telah melakukan *monitoring* terhadap pengembangan nuklir Tiongkok (Burr, 2014).

Disisi lain, Amerika Serikat terus meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan India. Hal ini menunjukkan bahwa menjalin aliansi dengan India merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal ini, Presiden W. Bush mengatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan negara-negara aliansi untuk melindungi warga negaranya dan menjaga perdamaian dunia melalui pidatonya yang berbunyi

> "To maintain peace, to protect our own citizens and our own allies and friends, we must seek security based on more than the grim premise that we can destroy those who seek to destroy us. Today's world requires a new policy, a broad strategy of active non-proliferation, counterproliferation, and defenses. We must work together with other like-minded nations to deny weapons of terror from those seeking to acquire them. We must work with allies and friends who wish to join with us to defend against the harm they can inflict. And together we must deter anyone who would contemplate their use" (The White House, 2001)

Oleh sebab itu, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan India sebagai salah satu *rising power Asia*. Saat ini, India telah diperhitungkan sebagai negara yang dapat mengimbangi dominasi nuklir Tiongkok di kawasan Asia Pasifik (Twining, 2015). Kerjasama antara India dan Amerika Serikat sendiri dimulai sejak tahun 2002 dengan fokus kepada kerjasama nuklir, militer, dan *counter-terrorism*. Namun, kerjasama diantara kedua negara tersebut terus berkembang ke bidang-bidang lain seperti ekonomi dan industri sehingga kerjasama yang terjalin antara keduanya berubah menjadi kerjasama multisektoral (Tomar, 2012).

Dalam bidang pengembangan nuklir sendiri, Amerika Serikat telah menunjukkan posisinya untuk mendukung India dalam keanggotaan NSG. Amerika Serikat juga memberikan *assistance* terkait dengan pengembangan nuklir India melalui kerjasama yang telah disepakati oleh Presiden Bush dan Perdana Menteri Manmohan Singh pada tahun 2006. Kerjasama tersebut berfokus kepada bantuan dana yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada India untuk mendanai pengembangan nuklir India (Hei dan Linzer, 2006). Dalam pertemuannya di New Delhi dengan Perdana Menteri Singh, Presiden Bush juga mengatakan bahwa waktu telah berlalu dan kepala pemerintahan dapat melakukan tindakan yang berbeda. Amerika Serikat mencoba untuk berfikir dengan cara yang berbeda, tidak terjebak pada masa lalu, dan mengakui India sebagai *nuclear power* yang dapat membantu Amerika Serikat dalam mencapai beberapa tujuan penting. Merespon pernyataan Presiden Bush, Perdana Menteri Singh kemudian berkata kepada media bahwa Amerika Serikat dan India telah membuat sejarah baru melalui pernyataannya yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, yang berbunyi "we have made history today, and I thank you" (Hei dan Linzer, 2006).

Perubahan respon Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India tahun 2005 kemudian mendapatkan berbagai respon dari banyak negara, diantaranya adalah Tiongkok yang mengatakan bahwa setidaknya India harus menandatangi NPT terlebih dahulu sebelum bergabung dengan NSG (Gahlot, 2016). Beberapa pengstudi nuklir dunia juga mempertanyakan perubahan sikap Amerika Serikat yang memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama nuklir dengan India. Bagi para pengstudi, tindakan Amerika Serikat yang mendukung India dalam mengembangkan nuklirnya akan membuat geram negara-negara, seperti Brazil dan Afrika Selatan yang telah memutuskan untuk menghentikan mengembangkan nuklir guna mematuhi rezim internasional non-proliferasi nuklir (Ramesh, 2005). Namun, dalam merespon hal tersebut Presiden Bush berkata "I will seek agreement from Congress to adjust US laws and policies, and work with friends and allies to adjust international regimes for cooperation and trade with India." Hal ini disebabkan karena Presiden Bush dan mayoritas jajaran pemerintahannya melihat India sebagai sebuah *essential counterweight* untuk menekan ambisi Tiongkok di Asia (Ramesh, 2005).

Perubahan respon Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India sejak tahun 2005 ini kemudian dapat dianalisis menggunakan teori *balance of power*. Berkaitan dengan hal ini, Amerika Serikat mengubah responnya terhadap pengembangan nuklir India pada tahun 2001 dan 2005 yang mana pada saat itu Tiongkok juga menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Pasifik. Dalam teori *balance of power,* negara-negara akan cenderung melakukan *balancing power* kepada negara lain hingga tercapai *equilibrium* guna menjaga eksistensinya dalam dunia internasional (Lobell, 2014). Sebagaimana asumsi dasar teori neorealisme bahwa negara memiliki kepentingan nasional dan kepentingan tersebut dapat dicapai melalui kerjasama, maka perubahan respon Amerika Serikat terhadap nuklir India pada tahun 2001 dan 2005, serta kerjasama yang dilakukan antara keduanya dapat dilihat sebagai usaha pemenuhan kepentingan Amerika Serikat. Selanjutnya, bagaimana Amerika Serikat memenuhi kepentingannya dapat ditunjukkan melalui teori *balance of power*.

Teori *balance of power* sendiri menekankan pada kondisi *equilibrium* yang harus dicapai negara untuk mempertahankan eksistensinya. Negara akan melakukan *balancing power* terhadap negara lain yang memiliki kapabilitas *power* lebih besar. Sedangkan *balancing power* yang seringkali dilakukan oleh negara-negara pada taraf internasional disesuaikan dengan adanya distribusi *power* yang terjadi dalam sistem internasional (Lobell, 2014). Dalam distribusi kapabilitas bipolar dimana terdapat dua *great powers*, negara akan melakukan *balancing* melalui pengembangan kapabilitas militer internal negaranya. Sedangkan dalam distribusi kapabilitas multipolar dimana terdapat tiga atau lebih negara yang kuat, negara akan melakukan *balancing* melalui bentuk *counterbalancing alliances* (Lobell, 2014). Disisi lain, Amerika Serikat melihat India memiliki kapabilitas dalam pengembangan nuklir dan telah mengakui India sebagai *Major Defense Partner*. Amerika Serikat juga melihat India sebagai negara yang akan membantu Amerika Serikat dalam Missile

Technology Control Regime dan bersedia untuk bekerjasama dalam membetuk sebuah teknologi pertahanan yang terbaik bagi kedua negara (Iqbal, 2016).

Menjaga Stabilitas Keamanan Internasional

Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang dinamis akan pengembangan senjata nuklir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara-negara dalam kawasan tersebut yang mengembangkan senjata nuklirnya. Selain India, Pakistan adalah salah satu negara yang paling aktif dalam menggembangkan nuklirnya. Pakistan memulai pengembangan nuklirnya pada tahun 1970an dan secara resmi melakukan uji coba nuklir pada tahun 1998 sesaat setelah India melakukan uji coba nuklirnya. Selain itu, Pakistan juga mendeklarasikan dirinya sebagai negara dengan senjata nuklir (NTI.org, 2016). Pakistan terus melakukan pengembangan dan modernisasi terhadap senjata nuklirnya hingga pada tahun 2015, Pakistan menyatakan bahwa negaranya telah mengembangakn *tactical nuclear weapons* yang akan digunakan untuk menyelesaikan konfliknya dengan India. Hal inipun menjadi perhatian khusus bagi masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat (NTI.org, 2016).

Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat menunjukkan sikapnya melalui *press release* resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dikutip dari situs halaman website resmi milik Amerika Serikat, disebutkan bahwa negara tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan internasional (US Departement of State, 2017). Dalam menjaga keamanan internasional sendiri, Amerika Serikat telah membagi beberapa departemen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menangani permasalahan keamanan di berbagai bidang seperti *regional stability, counter-terrorism, homeland security, weapons and mass destruction,* serta *international crime and drugs* (US Departement of State, 2017). Berkaitan dengan senjata nuklir sendiri, Amerika Serikat memiliki departemen yang berfungsi untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dalam skala internasional. Departemen ini bertugas untuk mengurangi ancaman senjata nuklir bagi Amerika Serikat dan negara aliansinya. Di kawasan Asia Selatan, departemen *weapons and mass destruction* bertugas untuk mengontrol perkembangan nuklir di beberapa negara Asia Selatan, seperti India dan Pakistan (US Departement of State, 2017). Sebagaimana yang dikutip dari halaman website resmi pemerintahan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa

> "The Department encourage nuclear and missile restraint in South Asia. Open-ended nuclear weapon and missile programs in India and Pakistan threaten regional and international security and increase the risk of onward proliferation from the region. The Department will encourage India and Pakistan to restrain their programs, adopt measures designed to reduce nuclear risks, and bring their export control laws and practices in line with international standards." (US Departement of State, 2017).

Dalam hubungan internasional sendiri, terdapat sebuah teori *hegemonic stability* yang melihat bahwasannya sistem internasional bergantung pada sebuah struktur yang memiliki kecenderungan untuk tidak stabil, apabila tidak ada negara hegemon yang berperan dalam mengambil alih kepemimpinan (Steans et al, 2005). Sehingga, dibutuhkan peran sebuah *major power* agar stabilitas keamanan internasional tetap terjaga. Banyaknya negara yang mengembangkan nuklir di kawasan Asia Selatan tentu mempengaruhi stabilitas keamanan baik dalam lingkup regional maupun Internasional. Teori hegemonic stability sendiri pertama kali dikemukakan oleh Charles Kindleberger setelah ia melakukan kajian serius tentang sejarah *the Great Depression*. Dalam pandangan kaum realis, negara dilihat sebagai aktor rasional yang bersifat egois dan hanya memperdulikan usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Disisi lain, bagi Kindleberger, pemimpin negara harus menyediakan *public goods* untuk menjaga stabilitas dalam arena internasional (Liu dan Ming-Te, 2011).

Dengan menjaga stabilitas ekonomi internasional liberal, negara mendapatkan dukungan sebagai pemimpin dalam jangka panjang yang memiliki *power*. *Power* tersebut mengandung kapabilitas ekonomi, politik, dan militer yang dapat digunakan untuk melakukan *arrangement* dari norma ekonomi dan politik internasional (Liu dan Ming-Te, 2011). Robert Keohane kemudian berusaha untuk mengembangkan teori Kindleberger dengan menjelaskan keterkaitan antara ekonomi negara hegemon dan sistem perdagangan internasional dengan teori yang dibawa oleh Kindleberger. Hasilnya, Keohane menemukan fakta bahwa negara hegemon harus memiliki kontrol atas bahan dasar, mengontrol sumber daya dan modal, serta mengontrol pasar dan kebutuhan dalam menghasilkan barang jadi yang berkualitas dan kompetitif. Sehingga, kekuatan hegemon tidak hanya dilihat dari kapabilitas dalam memimpin perekonomian internasional melalui modal finansial, tetapi juga harus memiliki kapabilitas dalam teknologi dan mengontrol sumber daya alam (Liu dan Ming-Te, 2011).

Berkaitan dengan hal ini, Amerika Serikat merupakan negara dengan kapabilitas ekonomi tinggi. Pada tahun 2004, pertumbuhan GDP Amerika Serikat mencapai 3.9% dari tahun 2001 dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi apabila dibandingkan dengan negara besar lainnya, seperti Jerman, Kanada, Jepang dan Inggris. Produksi industri dan aktifitas bisnis Amerika Serikat juga menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut (Caughey, 2005). Berikut adalah tabel perbandingan pertumbuhan GDP negara-negara besar pada tahun 2004.

Gambar 3.2 Tabel Perbandingan GDP Negara-Negara Besar

International Comparisons					
	Canada	**Germany**	**Japan**	**United Kingdom**	**United States**

Real GDP (% chg. on year ago)					
2002 (Q4)	3.9	0.5	2.8	2.2	2.9
2003 (Q4)	1.6	0.2	3.4	2.8	4.3
2004 (Q4)	3.0	1.5	0.8	2.9	3.9
Industrial Production (1997=100)					
2002	116.1	109.9	91.7	100.0	111.0
2003	117.0	110.3	94.5	99.8	115.5
2004	121.0	113.4	99.6	99.8	115.5

Sumber: comw.org, 2005

Di kawasan Asia Selatan sendiri, Amerika Serikat tidak jarang turut berkontribusi dalam menyelesaikan konflik-konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada beberapa negara. Di India sendiri, Amerika Serikat telah memberikan banyak bantuan dana yang menjadikan India sebagai salah satu negara *top recipient* bantuan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan dana bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada India dari tahun 1946-2012 yang mencapai 65,1 milyar Dollar AS (Rajghattal, 2015). Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga tercatat telah memberikan bantuan dana kepada India sebesar 100 juta Dollar AS untuk memulai perdagangan pada tahun 1990an. Selain itu, Amerika Serikat juga berperan dalam usaha penyelesaian konflik Khasmir antara India dan Pakistan. Hal ini menunjukkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Selatan yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga militer dan keamanan. Dalam situs halaman website resmi Amerika Serikat, disebutkan bahwa

> "United State's interest is to reducing tensions between India and Pakistan, both armed with nuclear weapons, is critical to regional and world security. We will press India and Pakistan toward dialog on all issues, including Kashmir. We will continue to work with Pakistan to promote reforms that will create a more stable, democratic, and prosperous nation. With India, a sister democracy, we will continue to work together on shared strategic interests." (US Departement of State, 2017)

Dari pernyataan-pernyataan Amerika Serikat yang telah disebutkan di atas, Amerika Serikat menunjukkan kepentingannya di Asia Selatan yang ingin mengontrol

pengembangan nuklir dan menyelesaikan berbagai konflik yang ada, baik melalui usaha mediasi maupun pemberian bantuan kemanusiaan guna menjaga stabilitas keamanan internasional (US Departement of State, 2017).

Kesimpulan

Pada tahun 1998, India melakukan uji coba nuklir dengan jangkauan ledakan sejauh 5.500km. Dalam merespon hal tersebut, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi dan militer. Dalam hal ini, Amerika Serikat menghentikan seluruh bantuan ekonomi maupun militer kepada India yang sempat menyebabkan perekonomian dan keamanan India menjadi tidak stabil. Bahkan, Amerika Serikat juga menghentikan seluruh bantuan yang diberikannya kepada India, termasuk bantuan kemanusiaan berupa dana tahunan yang berjumlah mencapai 142 juta Dollar per tahun. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menghentikan seluruh military assistance dan penjualan perlengkapan militer asing kepada India. Namun pada tahun 2001, respon Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India sedikit berubah. Hal ini terbukti ketika Presiden George W. Bush resmi mengangkat seluruh sanksi yang pernah diberikan negaranya kepada India pada 22 September 2001.

Pasca diangkatnya sanksi-sanksi tersebut, Amerika Serikat juga menunjukkan perubahan responnya terhadap pengembangan nuklir India dengan menjalin hubungan bilateral khususnya dalam bidang energi nuklir. Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan India kemudian berkembang dengan pesat sehingga pada tahun 2004, kerjasama yang awalnya hanya berfokus pada bidang nuklir telah berubah menjadi kerjasama multisektoral. Sedangkan pada tahun 2005, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada India untuk bergabung dengan Nuclear Suppliers Group (NSG) melalui pernyataan White House Press Secretary, Josh Earnest. Dengan bergabung ke dalam NSG, India akan lebih mudah mengakses bahan dasar dan teknologi untuk terus mengembangkan nuklirnya. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada India untuk menjadi salah satu anggota NSG telah menunjukkan perubahan respon Amerika Serikat yang diberikan pasca uji coba nuklir tahun 1998.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan dibalik perubahan respon Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India pada tahun 2001 dan 2005, yaitu perubahan sistem internasional multipolar, perimbangan dominasi kekuatan Tiongkok, dan keinginan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. pada abad ke-20, muncul negara *rising power* seperti India dan Tiongkok yang memiliki kapabilitas ekonomi dan militer yang terus meningkat sejak awal tahun 1990an dan mulai diperhitungkan. Oleh sebabnya, kedua negara ini mulai diakui sebagai negara *rising power Asia*. Kapabilitas Tiongkok dalam mengembangkan senjata nuklir yang terus meningkat kemudian membuat Amerika Serikat melihat Tiongkok sebagai kompetitor. Sehingga Amerika Serikat melakukan *counterbalancing alliances* melalui hubungan kerjasama dengan India sebagai bentuk perimbangan Amerika Serikat terhadap dominasi kekuatan Tiongkok. Selain itu, melalui hubungan kerjasama nuklir antara Amerika Serikat dan India, Amerika

Serikat dapat membatasi dan mengontrol pengembangan nuklir yang dilakukan India. Sehingga, hal tersebut dapat membantu dalam menjaga stabilitas keamanan internasional.

Daftar Pustaka

Bieler, Andrean. 2008. *The Anarchy Problematique and Sovereignty: Neo-Realism and State Power*, [pdf] tersedia dalam http://andreasbieler.net/wp-content/files/Neo-realism.pdf (diakses pada 29 Oktober 2017).

Burr, William. 2014. *China's First Nuclear Test 1964 -- 50th Anniversary*, [online] tersedia dalam https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb488/ (diakses pada 5 November 2017).

Caughey, Andrew. 2005. *The Pulse of Capitalism*, [online] tersedia dalam http://www.comw.org/poc/0504.html (diakses pada 27 November 2017).

Gahlot, Mandakini. 2016. *India's Nuclear Riddle: People and Power Investigates Whether India is About to Escalate its Nuclear Arms Race with Rivals Pakistan and China*, [online] tersedia dalam http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2016/08/india-nuclear-riddle-160831143938805.html (diakses pada 11 Mei 2017).

Hei, Vande dan Dafna Linzer. 2006. *US-India Reach Deal on Nuclear Cooperation*, [online] tersedia dalam http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/02/AR2006030200183.html (diakses pada 6 November 2017).

Iqbal, Anwar. 2016. *US-India Defense Pact to Impact Pakistan, China*, [online] tersedia dalam https://www.dawn.com/news/1280873 (diakses pada 30 Oktober 2017).https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations (diakses pada 25 Oktober 2017).

Johnston, Alistair Ian. 1996. *Prospect for Chinese Nuclear Force Modernization: Limited Deterrence Versus Multilateral Arms Control*, [online] tersedia dalam http://www.nti.org/learn/countries/china/nuclear/ (diakses pada 29 Oktober 2017).

Kristensen, Hans M. 2006. *Nuclear Weapons: China*, [online] tersedia dalam https://fas.org/nuke/guide/china/nuke/index.html (diakses pada 27 Oktober 2017).

Lobell, Steven E. 2014. *Balance of Power Theory*, [online] tersedia dalam https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikjtygpvPWAhWIopQKHc8qDXMQFghqMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.oxfordbibliographies.com%2Fview%2Fdocument%2Fobo-9780199743292%2Fobo-9780199743292-0083.xml&usg=AOvVaw0Mks7_hy9OdRqOeCzJgWnV (diakses pada 16 Oktober 2017).

Mea.gov.in. 2013. *India–U.S. Relations*, [pdf] tersedia dalam https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-U.S._Relations.pdf (diakses pada 12 Mei 2017).

Medalia, Jonathan dan Dianne Rennack. 1998. *India-Pakistan Nuclear Test and US Response*, [pdf] tersedia dalam https://www.everycrsreport.com/files/19981124_98-570_6ba82961282f5bb2b429282bbb444eeda17df798.pdf (diakses pada 7 September 2017).

Morrow, Daniel dan Michael Carriere. 1999. *The Economic Impacts of The 1998 Sanctions on India and Pakistan,* [pdf] tersedia dalam https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf (diakses pada 13 September 2017).

Nuclearweponarchive.org. 2001. *India's Nuclear Weapons Program: Operation Shakti 1998,* [online] tersedia dalam http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html (diakses pada 10 September 2017)

Nti.org. 2016. *Pakistan's Nuclear*, [online] tersedia dalam http://www.nti.org/learn/countries/pakistan/nuclear/ (diakses pada 30 Oktober 2017).

Ontheissues.org. 2017. *George W. Bush on China*, [online] tersedia dalam http://www.ontheissues.org/celeb/George_W__Bush_China.htm (diakses pada 29 Oktober 2017).

Rajghattal, Chidanand. 2015. *India Top Recipient of US Economic Aid*, [online] tersedia dalam https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/India-top-recipient-of-US-economic-aid/articleshow/48093123.cms (diakses pada 27 November 2017).

Ramesh, Randeep. 2005. *America to Aid India's Nuclear Power Project*, [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2005/jul/20/india.usa (diakses pada 6 November 2017).

Rennack, Dianne E. 2003. *India and Pakistan:US Economic Sanctions*, [pdf] tersedia dalam https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs5088/m1/1/high_res_d/RS20995_2003Feb03.pdf (diakses pada 4 Oktober 2017).

Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas. 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*. Pearson & Longman, 2nd edition.

Thehindu.com. 2016. *US Asks NSG Members to Support India's Bid*, [online] tersedia dalam http://www.thehindu.com/news/international/world/US-asks-NSG-members-to-support-India%E2%80%99s-bid/article14435666.ece (diakses pada 12 Mei 2017).

The White House. 2001. *President Bush's Speech on Nuclear Strategy: Arms Control Today*¸ [online] tersedia dalam https://www.armscontrol.org/print/857 (diakses pada 5 November 2017).

Tomar, Ravi. 2002. *India-US Relations in a Changing Strategic Environment: The Bush Administration 2001*, [online] tersedia dalam https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Pa

rliamentary_Library/pubs/rp/rp0102/02RP20 (diakses pada 22 Oktober 2017).

Twining, Daniel. 2015 *The US-India-China Triangle in the 21st Century*, [online] tersedia dalam https://www.jewishpolicycenter.org/2015/05/31/us-india-china-triangle/ (diakses 2 Juni 2017).

United States Departement of State. 2017. *Achieve Peace and Security*, [online] tersedia dalam https://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2004/23504.htm (diakses pada 27 November 2017).

Waltz, Kenneth N. 1979. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill